

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT PERIODE 2016-2021

Vivin Tri Indawati Gulo¹, Imelda Rimenda Purba²

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas
Email: vivingulo2016@gmail.com, imelda.rimenda.purba@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), on the Capital Expenditure of West Nias Regency. So that the sample is 18 where (PAD 6, DAU 6, Capital Expenditure 6) from 2016-2021. The research method used is descriptive quantitative using secondary data sourced from the regional government budget report of West Nias Regency in 2016-2021. The data analysis technique used is multiple linear regression statistical analysis. The analysis process carried out first is descriptive statistics, classical assumption tests, and hypothesis testing. The results of this study partially show that Regional Original Income has no effect on Capital Expenditures and the results of the study simultaneously show that the General Allocation Fund has no significant effect on Capital Expenditures.

Keywords: *Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Capital Expenditure*

PENDAHULUAN

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 1999. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (PEMDA) yang telah menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 01 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis.

Undang – undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dan maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah seperti halnya pada pemerintah pusat, pengurusan keuangan pada PEMDA juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian, PEMDA memiliki APBD dalam pengurusan umum dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan PEMDA yang dibahas dan disetujui bersama oleh PEMDA dan DPRD dan diterapkan dengan peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain Pendapatan Asli Daerah. PAD yang tinggi merupakan impian yang harus di perjuangkan oleh setiap daerah untuk mencapainya. Halim (2001) menyatakan bahwa daerah yang ditanjung dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap

tingkat produktifitas masyarakat yang akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan suatu daerah. Tingginya PAD suatu daerah menggambarkan kemandirian suatu daerah otonom, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah akan bantuan dana dari pemerintah pusat semakin rendah Pasal 6 UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengungkapkan bahwa PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain – lain PAD yang sah;

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU suatu daerah adalah kebutuhan wilayah otonomi daerah yang bersangkutan dikurangi potensi ekonomi daerah. Halim (2004) menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena adanya transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal. Bobot daerah adalah proporsi kebutuhan DAU suatu daerah dengan total kebutuhan DAU seluruh daerah. Dana Alokasi Umum untuk masing – masing kabupaten/kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam laporan realisasi APBD.

APBD tidak hanya mengandung unsur pendapatan saja, tapi juga belanja daerah, dimana belanja daerah adalah pengeluaran – pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah daerah menggunakan dana tersebut untuk belanja daerah. Belanja daerah sendiri terdiri atas : Kelompok belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, tak terduga. Kelompok belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan Belanja Modal. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal/Belanja Modal yang merupakan pengeluaran dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas diberbagai sektor serta meningkatkan produktifitas masyarakat yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Nugroho (2010) menyatakan bahwa peningkatan Belanja Modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, dan peralatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi juga produktivitas perekonomian.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Pergeseran Belanja Modal ini dilakukan untuk meningkatkan investasi modal yang tinggi maka kualitas dan perbaikan layanan publik juga dapat ditingkatkan, sehingga dapat berpotensi untuk dapat dikembangkan menjadi sumber PAD. Pemerintah daerah dituntut mampu mengalokasikan Belanja Modal dengan efisien karena Belanja Modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada publik.

Penelitian sejenis sebelumnya telah dilakukan (Sidabutar, 2013) meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

PAD dan DAU secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pengaruh PAD dan DAU ini dapat diketahui ketika kedua variabel ini diregresikan terhadap Belanja Modal.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip – prinsip menurut Devas, dkk (1989), yaitu sebagai berikut :

- a. **Tanggung Jawab (*accountability*)**
Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah dan masyarakat umum.
- b. **Mampu memenuhi kewajiban keuangan**
Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah di tentukan.
- c. **Kejujuran**
Hal – hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar – benar jujur dan dapat dipercaya.
- d. **Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)**
Pengelolaan keuangan daerah yang direncanakan dan dilaksanakan dengan biaya yang serendah – rendahnya dan dalam waktu yang sesingkat – singkatnya untuk mencapai tujuan pemerintah daerah.
- e. **Pengendalian**
Aparatur pengelolaan keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang menduduki posisi penting. Pada hekekatnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing – masing serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Dengan demikian, maka APBD berfungsi sebagai wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar – benar akan dapat dirasakan pada saat tertentu oleh masyarakat (Bana dalam Dasril, et al, 2004).

Struktur APBD

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur APBD yang berlaku adalah anggaran yang berimbang = dimana jumlah penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau belanja. Kini struktur APBD mengalami perubahan, bukan lagi anggaran berimbang, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya, setiap daerah

memiliki struktur APBD sesuai dengan kapasitas keuangan dan pendapatan masing – masing daerah.

Struktur APBD berdasarkan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah terdiri atas sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah.
- b. Belanja Daerah.
- c. Pembiayaan.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (UU No. 32 Tahun 2004). Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah yaitu :

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain – lain PAD yang sah}$$

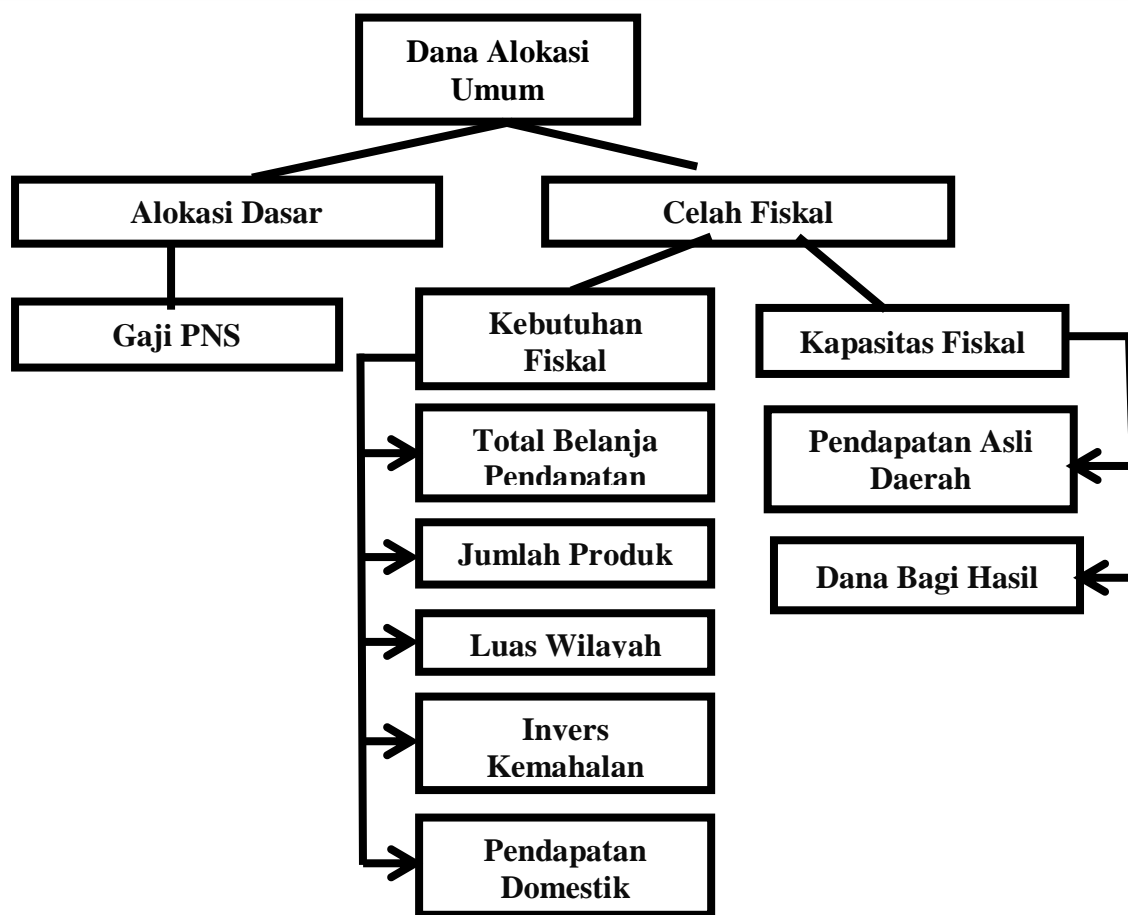
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang terdiri atas :
yang sebesar – besarnya melalui program – program dan kegiatan – kegiatan yang diluncurkan pemerintah daerah tersebut.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang – kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan adalah APBN.

Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD. Beberapa alasan perlunya dilakukan pemberian Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat kepada daerah, yaitu :

- a. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal vertikal. Hal ini disebabkan sebagian besar sumber – sumber penerimaan utama di negara yang bersangkutan. .
- b. Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.
- c. Untuk menjaga standar pelayanan minimum di setiap daerah tersebut.
- d. Dana Alokasi Umum dapat dikurangi disaat perekonomian daerah sedang maju pesat, dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian sedang lesu.



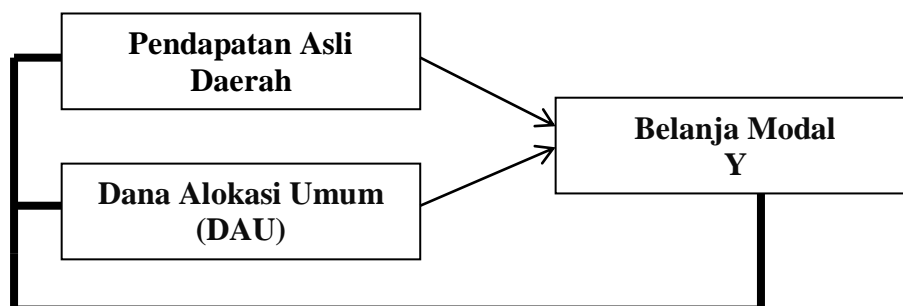
Gambar 1. Formula Dana Alokasi Umum

c. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005).

Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Indikator Belanja Modal diukur dengan :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan. Dari penjelasan teori diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Nias Barat tepatnya di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) yang beralamat di Kawasan SKPD Terpadu Kabupaten Nias Barat, Onolimbu, Lahomi, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, 22864.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2008 : 115). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah APBD Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang dipandang mewakili populasi. Sampel penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Tahun 2016 – 2021, maka jumlah data yang diolah adalah sebanyak 18 (PAD 6, DAU 6, Belanja Modal 6). Teknik penentuan sampel adalah *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel dipermudah.

Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu.

Adapun variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Indikatornya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Skala pengukurannya adalah skala rasio dalam satuan rupiah.
- b. Dana Alokasi Umum (X2) adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Belanja Modal (Y) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan inventaris yang memberikan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Indikatornya diukur dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin serta belanja modal fisik lainnya. Skala pengukurannya adalah skala rasio dalam satuan rupiah. Data rasio adalah data yang bersifat angka dalam arti sesungguhnya dan dapat dioperasikan dalam matematika (Sujarweni, 2014:21).

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data, Teknik dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh dari instansi

pemerintahan yang sudah diolah sebelumnya berupa Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda (*multiple regression*), hal ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan hipotesis penelitian ini. Metode regresi linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal. Hubungan antara variabel tersebut dapat digambarkan dengan Rumus sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + e$$

Dimana :
Y : Belanja Modal
 α : Konstantan
 β : Slope atau koefisien regresi atau intersept
PAD : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
DAU : Dana Alokasi Umum
e : error

a. Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan membangkitkan t hitung dengan tabel pada tingkat signifikan 5% (*level of significant* 5%) dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

$H_0 : \beta = 0$ artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta \neq 0$ artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka H_a diterima,

jika $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

b. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama – sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dan F tabel pada *level of significant* dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_k = 0$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \beta_k = 0$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi PEMDA dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. Pendapatan dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah. Kebijakan semua penggunaan dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini serta dapat menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum serta nilai rata-rata standard deviasi dari masing-masing variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi PAD, DAU, dan Variabel dependent yaitu Belanja Modal sebagaimana terlihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	6	15,691,708,086,10	40,193,008,207,19	2,452,373,583,972,50	1,075,960,086,983,518
DAU	6	329,531,869,000,00	359,696,030,000,00	34,338,844,573,616,67	1,102,077,509,949,274
Belanja Modal	6	66,782,615,303,00	247,896,475,505,00	16,062,496,636,203,33	6,438,393,390,653,554
Valid N (listwise)	6				

Pengujian Hipotesis

Tabel 2 Uji regresi
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	113.799.794.95	2,700		-4,214	,024
	PAD	0,016	,264	,071	4,862	,836
	DAU	0,345	,177	,009	4,401	,541

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh rumus regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 113.799.794.952,100 + 0,016PAD + 0,345DAU + e$$

Berdasarkan rumus regresi tersebut dapat dianalisis pengaruh masing-masing variable independen terhadap Belanja Modal yaitu :

- Nilai konstanta Belanja Modal (Y) sebesar 113.799.794.952,100 yang artinya jika variable independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum adalah 0 atau tidak ada maka nilai tetap Belanja Modalsebesar 113.799.794.952,100.
- Nilai koefisien regresi (X1) adalah 0,016 pada variabel Pendapatan Asli Daerah yang berarti setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Modal Pemerintah sebesar 1,6%.
- Nilai koefisien regresi (X2) adalah 0,345 pada variabel Dana Alokasi Umum yang berarti setiap kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Modal Pemerintah sebesar 34,5%.

Dari pengujian asumsi dapat disimpulkan bahwa data yang ada berdistribusi, tidak terdapat autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan pengujian atas hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji f.

Uji Statistik t (Uji t)

Tabel 3 Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

Coefficients^a

1	(Constant)	113.799.794.95 2,100	2,700		-4,214	,024
	PAD	0,016	0,264	,071	4,862	,836
	DAU	0,345	0,177	,009	4,401	,541

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t), Diketahui nilai signifikansi (sig) variabel :

- a. Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai signifikan sebesar $0,836 > 0,05$ dengan nilai t_{hitung} sebesar $4,862 > 1,753$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
- b. Dana Alokasi Umum mempunyai nilai signifikan sebesar $0,541 > 0,05$ dengan nilai t_{hitung} sebesar $4,401 > 1,753$, Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. yang berarti Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Uji Simultan (Uji f)

Signifikan model regresi secara simultan di uji dengan melihat perbandingan antara F_{tabel} dan F_{hitung} . Selain itu akan dilihat nilai signifikansi, dimana jika nilai signifikan sebesar 0,5 atau 5%, jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2016). Uji F digunakan untuk menguji hubungan regresi antar variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 4 Uji F

Model	Df	F	Sig.
1 Regression	2	2,51	,12 ^b
Residual	3		
Total	5		

Berdasarkan hasil uji F di atas, maka nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ yaitu $2,51 < 3,63$ dengan tingkat signifikan $0,12 < 0,05$. Berdasarkan tingkat signifikansi tersebut, maka hasil uji F dalam penelitian ini diketahui bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,673	,346	,358	1,835	2,735

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,346 atau 34,6%. Hal ini berarti hanya 34,6% variabel anggaran belanja modal dapat dipengaruhi oleh kedua variabel independen sedangkan sisanya 65,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Dari hasil (uji t) Variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal. Ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pradita

(2011), yang telah membuktikan secara empiris Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

- b. Dari hasil (uji t) Variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001) dan Situngkir (2009).
- c. Hasil uji F menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
- d. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,346 atau 34,6 %. Hal ini berarti hanya 34,6 % variabel realisasi anggaran Belanja Modal dapat dipengaruhi oleh kedua variabel independen sedangkan sisanya 65,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Saran

- a. Pemerintah Daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada pemerintah pusat bisa dikurangi.
- b. Pemerintah Daerah sebaiknya melaksanakan sosialisasi dikalangan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasril, et al. 2004. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Jurnal. : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
- Devas, dkk. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21 Update PLS Regresi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Legrenzi dan Milas. 2001. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta sebagai Pemoderasi. Jurnal. : Bali.
- Nugroho. 2010. Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek dengan metode USDP. PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Pradita, Rizandra Ratna. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. Jurnal. Jawa Timur.
- Sidabutar, Rimbun. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Skripsi. Medan : Universitas HKBP Nommensen.
- Situngkir, Anggiat. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Anggaran Belanja Modal. Skripsi. : Studi di Kabupaten/Kota Sumatra Utara, USU Medan.
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah